

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pariwisata	7
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata	8
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pariwisata	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB VIII PENUTUP	38

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pariwisata	7
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata	8
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pariwisata	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB VIII PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel	2.2.a.1	Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Dirinci Berdasarkan Golongan	9
Tabel	2.2.a.2	Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Dirinci Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu	9
Tabel	2.2.a.3	Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Dirinci Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel	2.2.1b	Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata	10
Tabel	2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	12
Tabel	2.3.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	15
Tabel	2.4	Objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan	17
Tabel	3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah "Dinas Pariwisata" Kabuapten Banggai Kepulauan Tahun 2021-2026	23
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata	30
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	32
Tabel	6.1	Rencana, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	35
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan selama lima tahun kedepan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah. Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap bidang dan/atau fungsi urusan pemerintahan jangka waktu 5 (Lima) tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, yang diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 – 2026 merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan dasar laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pariwisata dan juga evaluasi setiap tahun melalui pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renstra Dinas Pariwisata mengacu dari visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPD Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata akan mendukung pencapaian Visi Misi di RPD sesuai bidang tugasnya. Selain itu Renstra Dinas Pariwisata mengacu pada Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan Kemenparekraf. Sasaran, Strategi, Arah kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pariwisata harus selaras dengan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Kemenparekraf. Sehingga rencana program kegiatan Dinas Pariwisata secara langsung akan mendukung program kegiatan pariwisata provinsi dan kementerian. Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2023-2026 merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Pariwisata dalam pencapaian tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Landasan dalam penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- ✓ 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- ✓ 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 I-3 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten (RIPARKAB) Banggai Kepulauan Tahun 2020-2025.
25. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kab. Banggai Kepulauan;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Pariwisata yang akan dilaksanakan 4 (empat) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026, dan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Dinas Pariwisata untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pariwisata;
2. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Dinas Pariwisata;

3. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pariwisata dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata pada periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang yang akan dihadapi dan dinilai perlu diantisipasi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA

Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telaahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Telaahan RTRW dan KLHS RPD, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pariwisata.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Dinas Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini menjabarkan Renstra Dinas Pariwisata lebih lanjut dalam bentuk Renja Dinas Pariwisata, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama Bappelitbangda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu perangkat pelaksana otonomi daerah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dibidang kepariwisataan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai fungsi:

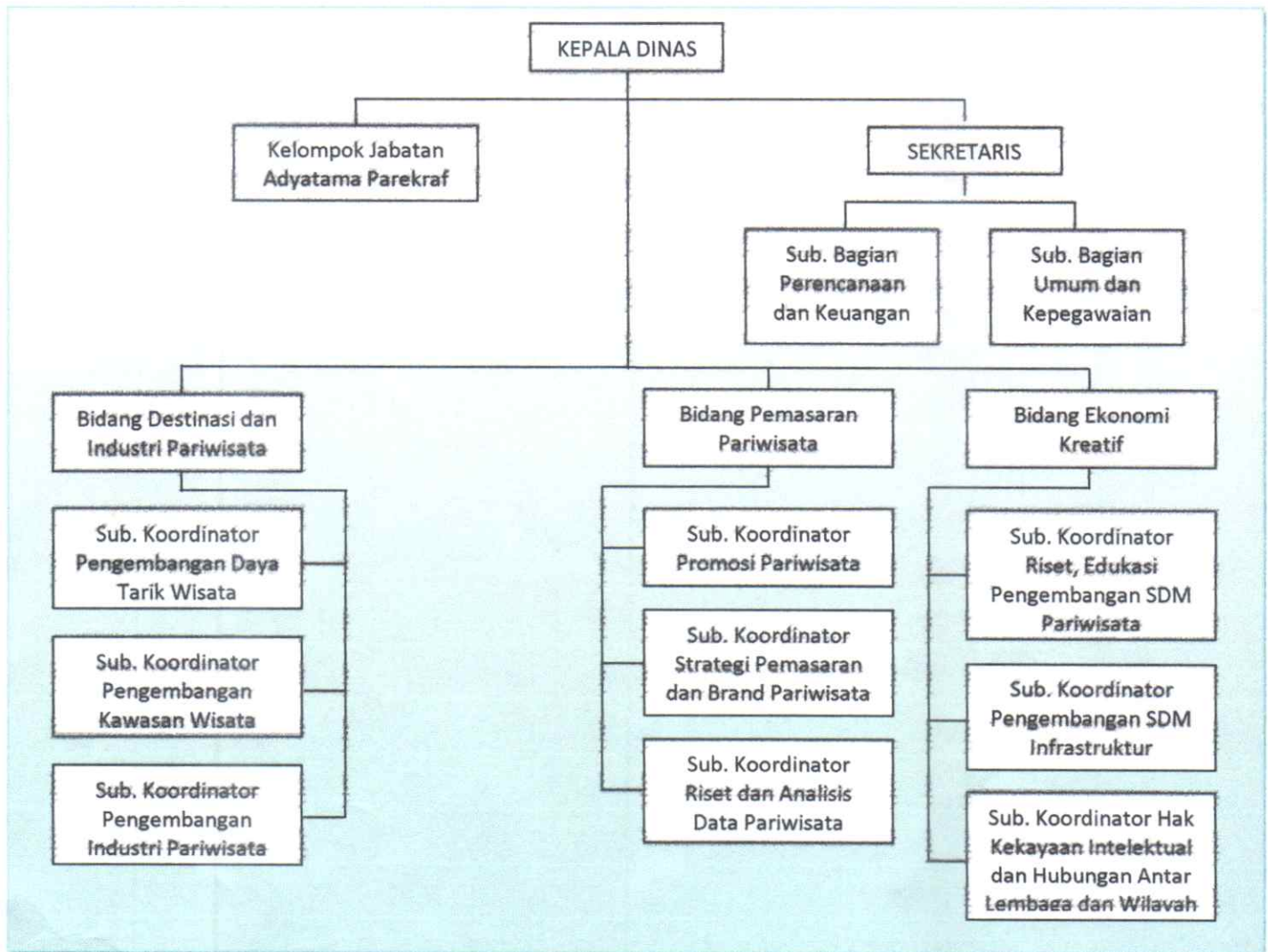
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
4. Bidang Pemasaran Pariwisata
5. Bidang Ekonomi Kreatif
6. Jabatan Fungsional Tertentu

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

Menurut Peraturan Bupati Nomor: Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
Kabupaten Banggai Kepulauan



2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga/instansi teknis yg bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak 15 Pegawai.

2.2.1 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

a. Susunan Kepegawaian/SDM

Dalam Penyelenggaraan TUPOKSI Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan kondisi kepegawaian pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1a.1
Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Dirinci Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan II	1 orang
2	Golongan III	12 orang
3	Golongan IV	2 orang
Jumlah		15 orang

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

Tabel 2.2.1a.2
Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Dirinci Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	2 orang
4	Jabatan Fungsional	8 orang
Jumlah		15 orang

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

Tabel 2.2.1a.3
Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Dirinci Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	3 orang
2	S1	11 orang
3	SMA	1 orang
Jumlah		15 orang

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

b. Sarana dan Prasarana perkantoran

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka ketersediaan Sumber Daya Manusia (*human resources*), sarana dan prasarana penunjang dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Adapun nilai asset tetap berupa sarana dan prasarana bagi aparaturnya Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Neraca Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan periode Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1b
Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata
Kabupaten Banggai Kepulauan
Periode 31 Desember 2021

NO	Jenis Aset	:	Luas/Jumlah	Keterangan
1	TANAH	:	2	Ada
2	ALAT-ALAT BESAR	:	1	Rusak
3	ALAT-ALAT ANGKUT	:	16	Rusak 1
4	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	:	546	Rusak 145
5	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	:	36	Rusak 15
6	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	:	3	Rusak 2
7	ALAT LABORATORIUM	:	219	Rusak 8
8	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	:	1	Ada
9	BANGUNAN GEDUNG	:	50	Rusak 9
10	MONUMEN	:	5	Ada
11	JALAN DAN JEMBATAN	:	3	Rusak 1
12	BANGUNAN AIR/IRIGASI	:	1	Rusak
13	INSTALASI	:	1	Ada
14	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	:	69	Rusak 47

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

b. Sarana dan Prasarana perkantoran

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka ketersediaan Sumber Daya Manusia (*human resources*), sarana dan prasarana penunjang dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Adapun nilai asset tetap berupa sarana dan prasarana bagi aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Neraca Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan periode Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1b
Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Dinas Pariwisata
Kabupaten Banggai Kepulauan
Periode 31 Desember 2021

NO	Jenis Aset	:	Luas/Jumlah	Keterangan
1	TANAH	:	2	Ada
2	ALAT-ALAT BESAR	:	1	Rusak
3	ALAT-ALAT ANGKUT	:	16	Rusak 1
4	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	:	546	Rusak 145
5	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	:	36	Rusak 15
6	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	:	3	Rusak 2
7	ALAT LABORATORIUM	:	219	Rusak 8
8	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	:	1	Ada
9	BANGUNAN GEDUNG	:	50	Rusak 9
10	MONUMEN	:	5	Ada
11	JALAN DAN JEMBATAN	:	3	Rusak 1
12	BANGUNAN AIR/IRIGASI	:	1	Rusak
13	INSTALASI	:	1	Ada
14	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	:	69	Rusak 47

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan berusaha untuk mengimplementasikan program/kegiatan dari tahun ke tahun semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya terhadap pelayanan masyarakat. Usaha ini disamping untuk mendorong/meningkatkan kepedulian masyarakat bidang kepariwisataan (sadar wisata) juga sebagai kepedulian terhadap kemiskinan, ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi juga kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama calon wisatawan maupun wisatawan yang mau ke/berada di Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan 4 program strategis yaitu:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan keempat program tersebut dengan melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang strategis, prioritas, efektif dan efisien yang telah disinergikan dengan stakeholders terkait maupun masyarakat dapat mewujudkan capaian yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Untuk lebih jelasnya, kinerja pelayanan dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET MSPK	TARGET IKK	TARG ET INDIK ATOR LAIN NYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Wisnu/Man	orang		10.110	10.360	10.610	10.860	11.110	10.110	68.074	102.248	39.576	115.260	100	6,57	9,63	3,64	10,37
2.	Lama kunjungan wisata (Hari)		Hari		1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (Juta)	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (Juta)	Persen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jumlah dan ragam obyek pariwisata yang dikembangkan dan terpelihara				0	28	28	33	33	0	28	28	33	33	1	1	1	2	2

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARG ET INDIK ATOR LAIN NYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.	Peningkatan jumlah pengunjung objek wisata	jumlah pengunjung objek wisata			1.750	2.000	2.500	2.750	3.000		66.299	100.219	37.072	112.260	0	3,31	4,00	1,34	3,74
6.	Jumlah kelompok sadar wisata	Jumlah kelompok sadar wisata			12	13	14	15	16	12	12	12	12	16	1	1	1	1	2
7.	Jumlah kemitraan strategi regional nasional kerjasama dengan perguruan tinggi negeri				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Dari tabel di atas, terlihat bahwa peningkatan jumlah wisatawan nusantara mengalami kenaikan, ini membuktikan setiap tahun pelayanan pariwisata semakin baik. Terkait lama tinggal wisatawan, dari tahun 2017 – 2021 tidak ada perubahan disebabkan wisatawan belum merasa betah untuk tinggal lama di Kabupaten Banggai Kepulauan. Wisatawan yang ke kabupaten banggai kepulauan masih wisatawan umum bukan minat khusus seperti Selam yang membutuhkan lama tinggal minimal seminggu.

Sedangkan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB belum tercapai, hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah yang mengatur sector pariwisata untuk jadi obyek pendapatan belum ada.

Tabel 2.3.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1 (1)	2 (2)	3 (3)	4 (4)	1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	1 (9)	2 (10)	3 (11)	4 (12)	ANGGARAN (13)	REALISASI (14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.826.912.800	2.556.932.750	2.947.615.329	3.004.833.006	1.296.299.450	2.506.489.598	1.232.015.900	2.816.543.187	0,70	0,98	0,42	0,94	57,28	2,33
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.982.000.000	1.180.136.000	350.045.965.000	388.848.470	296.480.000	1.180.136.000	1.181.669.000	318.052.060	0,45	1,00	0,33	0,82	27,37	1,00
Program Pemasaran Pariwisata	389.042.400	162.991.500	419.727.256	158.718.371	382.801.700	161.791.500	104.469.700	158.540.325	0,98	0,99	0,25	0,99	68,86	2,46
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	296.480.000	480.676.000	213.150.000	56.411.849	296.143.000	474.292.700	25.350.000	54.366.849	0,99	0,98	0,12	0,96	80,93	2,33

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa anggaran yang disiapkan untuk melakukan pelayanan belum berkesinambungan terlihat dari adanya program yang tidak dianggarkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pariwisata

Potensi Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai Kepulauan sangat banyak, dan yang sangat menonjol adalah potensi wisata diving. Sumber daya potensi Pariwisata ini menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten (RIPARKAB) Banggai Kepulauan Tahun 2020-2025., dapat dilihat pada tabel di Bawah ini :

Tabel 2.4
Objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan

OBJEK WISATA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN		
KECAMATAN	DESA	JENIS WISATA
Tinangkung	Ambelang	Danau Kuakon
	Bakalan	Pantai Pasir Putih Bakalan
	Ambelang	Permandian Pantai Teduang
	Kautu	Permandian Kautu
	Bakalan	Pulau Bakalan Pauno
	Kautu	Pasir Putih Kautu
	Tompudau	Pulau Bokiki
	Bonggan	Pulau Teluk Bayur
	Tompudau	Pulau Babalayan
	Baka	Benteng Bebengetan
	Salakan	Monumen Trikora
	Lalong	Danau Paisu Matano
Tinangkung Utara	Luksagu	Pantai Pagati
	Luksagu	Tanjung Karang
	Luksagu	Air Terjun Tembang
	Lalong	Pantai Pasir Putih Lalong
	Tatakalai	Paisu Matano
	Luksagu	Pantai pasir Merah
	Luksagu	Rumah Satu Tiang
Tinangkung Selatan	Tatakalai	Wisata Mangrove
		Air Terjun Mandoni

	Lomboan	Permandian Pantai Lomboan
	Tobing	Danau Batuno
	Tobing	Tanjung Bakadut
		Permandian
Totikum	Kanali	Pantai Bone Bulusan
	Kambutokan	Mesjid Tua
	Sambiut	Benteng Bungku
	Kambutokan	Pantai Pasir Putih Mandel
Totikum Selatan	Kanali	Danau Tendetung
	Kalumbatan	Perkampungan Suk Bajo
		Masuknya Injil Pertama
Liang	Liang	Gua Pentu
Peling Tengah	Patukuki	Permandian Lengbola
	Patukuki	Pantai Kerikil
Bulagi		Permandian Lalandai
	Montomisan	Keramat Kumbolon Mustika Putih
	Sosom	Makam Solondonot
	Sosom	Makam Raja Boas
	Sosom	Goa Lipu
	Peling Seasa	Makam Raja Dullu
Bulagi Utara	Lukpanenteng	Paisu Pok
	Lukpanenteng	Paisu Batango
	Lukpanenteng	Pantai Poganda
		Pantai anjung Labuan
		Pantai Bonepuso
		Pulau Banyak 35 Pulau
	Alambung	Air Terjun Bonepuso Batu Alambung
	Sabang	Batu Masigi

Bulagi Selatan	Sabang	Batu Duangan
	Emelu	Danau Emelu
		Benteng Lipuadino
		Makam Tua Imam Lipuadino
	Lolantang	Makam Tua Imam Sya'ban
	Osan	Tradisi Penguburan Mayat
	Osan	Pusat Pembuatan Periuk Tanah Liat
		Tradisi Suku Sea-Sea
	Lolantang	Masuknya Islam di Pulau Peling
	Alani	Masuknya Zending Protestan
Buko		Gagak Peling
	Batangono	Pulau Tikus
	Lalengan	Air Terjun Lalengan
		Pulau Tikus
Buko Selatan	Lumbi-Lumbia	Batu Mesea
	Matamaling	Pantai Indah Matamaling
		Pulau Posoan
		Makam Raja Dullu
		Pulau Tongan
		Pulau Balatindaan
		Ngulukan Batu
		Sabalande
		Pulau Sasambuan
		Kokuni
		Kolian Bukoti
		Olonduan
		Tinggubolindang
		Sanop
		Sabian
		Salambangan
		Sasambuli

	Marimali Konda Badumbekan
	Togong Babasal
	Soulong
	Togong Mosua
	Pulau Banyak
	Sanggar Batumesea

1. Berdasarkan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlihat bahwa titik berat pengembangan pariwisata berada pada pariwisata yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Diharapkan dalam masa pandemi covid 19, kreatifitas dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui bidang-bidang kreatif.
2. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, terlihat bahwa Provinsi Sulawesi Tengah menyusun strategi dan arah kebijakan dalam mengembangkan Pariwisata sebagai berikut :
 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia bidang pariwisata guna perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha industri pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
 2. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata daerah dan terus melakukan upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangannya untuk kesejahteraan masyarakat.
 3. Pengembangan potensi Geowisata, Geopark dan Cagar Biosphere
 4. Pengelolaan destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan kuliner, fashion, kriya kerajinan/souvenir khas, kebudayaan dan adat istiadat sebagai obyek wisata terpadu
 5. Pelayanan prima dan standarisasi mitra usaha jasa pariwisata.
 6. Penyusunan strategi pemasaran dan promosi seperti branding, advertisement,
 7. selling untuk pengembangan destinasi pariwisata serta meningkatkan kualitas produk pariwisata agar mampu bersaing di pasar global.
 8. Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata di dalam dan di luar negeri melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
 9. Meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi pariwisata serta atraksi wisata baru yang menarik.

Dari uraian tersebut di atas, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan dalam memanfaatkan peluang akan menghadapi tantangan ke depan, maka perlu mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan daerah sehingga strategi dan arah kebijakan yang diambil tepat sasaran dan fungsional.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata

Gambaran permasalahan pembangunan pariwisata beserta faktor yang mempengaruhinya dapat diidentifikasi melalui uraian permasalahan yang paling krusial tentang pelayanan dasar bidang kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui penilaian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang belum mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan maupun RPD Tahun 2023-2026. Berdasarkan pada hasil kajian RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan urusan pariwisata yang berpotensi untuk menghambat pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan potensi destinasi yang ada.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten (RIPARKAB) Banggai Kepulauan Tahun 2020-2025, telah ditetapkan banyak potensi destinasi yang sampai sekarang belum terkelola dengan baik bahkan sebagian besar masih terabaikan dan belum tersentuh campur tangan pemerintah sama sekali.

2. Event dan atraksi yang menambah lama kunjungan.

Salah satu yang membuat wisatawan betah-lama di suatu daerah adalah event dan atraksi yang menarik dan sangat unik yang tidak pernah di dapatkan di lokasi wisata lainnya. Semakin banyak atraksi yang disuguhkan maka akan membuat wisatawan merasa betah dan lebih terkesan. Hal ini belum ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Infrastruktur pariwisata dalam mendukung perekonomian

Sebelum pandemi covid-19 jumlah wisatawan yang datang terutama mancanegara masih sedikit. Apalagi lagi setelah terjadi pandemi. Hal ini disebabkan keadaan geografi Banggai Kepulauan dikelilingi oleh laut. Sehingga untuk mencapai lokasi yang ingin dikunjungi membutuhkan moda transportasi yang siap sedia mengantarkan setiap saat.

4. Amenitas pariwisata.

Hampir sebagian besar destinasi yang dikunjungi wisatawan miskin amenities. Hal ini terlihat tidak profesionalnya pengelolaan suatu destinasi, sehingga wisatawan setelah berkunjung kemungkinan besar tidak akan kembali untuk kunjungan berikutnya.

5. SDM pemasaran pariwisata.

Untuk mengembangkan pariwisata bukan saja faktor kualitas destinasi tapi juga bagaimana memasarkan destinasi tersebut agar dapat dikenal dan dikunjungi wisatawan.

6. Ketersediaan Sentra Ekonomi Kreatif.

Penyediaan cinderamata sebagai oleh-oleh wisatawan perlu wadah pemusatan kegiatan sehingga wisatawan tidak kerepotan mencari buah tangan untuk dibawa pulang. Sentra ekonomi kreatif merupakan solusi penting terutama mewadahi pengrajin-pengrajin dan pedagang cinderamata sehingga menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah "Dinas Pariwisata"
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021-2026**

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pengelolaan potensi destinasi yang ada	Standar Pengelolaan destinasi belum memenuhi syarat	Belum optimalnya pemberlakuan standar destinasi
2.	Event dan atraksi yang menambah lama kunjungan	Kurangnya event dan atraksi	Kurangnya pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan event dan atraksi
3.	Infrastruktur pariwisata dalam mendukung perekonomian	Akselerasi peningkatan usaha pariwisata belum optimal	Usaha pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan belum terstandarisasi sesuai peraturan yang berlaku
4.	Amenitas pariwisata	Amenitas di setiap destinasi belum ada	Belum ada pengusaha berinvestasi di bidang pariwisata
5.	SDM Pemasaran Pariwisata	Kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan	Rendahnya SDM pemasaran Pariwisata
6.	Ketersediaan Sentra Ekonomi Kreatif	Belum adanya sentra ekonomi kreatif	Kurangnya minat masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif

Secara garis besar ada 2 (dua) faktor yang menentukan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Potensi SDA Kabupaten Banggai Kepulauan yang mendukung pengembangan pariwisata sangat besar
- 2) Potensi asset benda dan tak benda kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan sangat besar.

b. Kelemahan

- 1) Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata dan ekraf.
- 2) Kearifan lokal belum menjadi penggerak dan motivasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Partisipasi masyarakat masih kurang dalam pengembangan pariwisata dan ekraf serta kebudayaan.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Kabupaten Banggai Kepulauan akan menjadi daerah pengembangan pariwisata nasional.
- 2) Kebijakan pusat maupun daerah sangat mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Banggai Kepulauan.

b. Tantangan

- 1) Pengelolaan pariwisata dan ekraf belum optimal;
- 2) Potensi Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata sangat besar;
- 4) Dukungan sektor lain terhadap pengembangan pariwisata masih rendah;
- 5) Kepuasan wisatawan terkait pelayanan pariwisata masih rendah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kabupaten Banggai Kepulauan tidak memiliki Visi dan Misi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Mengacu pada dokumen RPJMD ini juga berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan serta memperhatikan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJMD dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah serta mengintegrasikan secara umum sesuai regulasi yang berlaku Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam implementasi misi seperti termaksud dalam program dan kegiatan yang dibangun diatas semangat filosofi *Money follow* program baik program dan kegiatan Perangkat Daerah pendukung misi maupun program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipasi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1(satu) visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah : **"Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan gotong royong"**

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu :

- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Maju;
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Berdaya Saing;
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang Berkelanjutan;
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal;

Misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah :

- Misi ke-1 Presiden Republik Indonesia, peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.

- b. Misi ke-2 Presiden Republik Indonesia, memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. Misi ke-8 Presiden Republik Indonesia, Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata tersebut akan sangat berdampak pada pencapaian Visi dan Misi serta program prioritas unggulan kemasyarakatan yang sudah dicanangkan oleh Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode Tahun 2021 - 2026, yaitu:

VISI : "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"

Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;"

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan

Berdasarkan amanat dalam RPJPD Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah berisikan tekanan upaya pembangunan dan permasalahan yang akan diselesaikan dalam mencapai arah pembangunan yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan permasalahan dan upaya pembangunan lainnya. Olehnya itu skala prioritas pada masing – masing tahapan pembangunan akan berbeda, akan tetapi berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya. Visi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah "Mewujudkan Kabupaten Banggai Kepulauan yang Berdaya Saing, Sejahtera dan Merata".

Adapun misi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yaitu:

Misi 4 : "Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Social-economy welfare)"

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyelenggaraan Penataan Ruang antara lain:

1. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional , Provinsi dan Daerah;
3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan;
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Banggai Kepulauan;
6. Terwujudnya peluang-peluang berusaha sebagai seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahannya ruang-ruang;
7. Kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
8. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum;

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan dan telaahan Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata sasaran jangka menengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergambar dengan jelas tentang pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan. Dari gambaran pelayanan tersebut bila ditinjau dari aspek implikasi RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan hal-hal penting yang akan menjadi agenda prioritas dalam pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu:

1. Pengembangan obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing secara regional, nasional dan internasional;
2. Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan;
3. Pembangunan pariwisata daerah mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan KLHS;
4. Peningkatan event benuansa budaya dan pariwisata secara kuantitas dan kualitas.
5. Peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur bidang pariwisata, mitra usaha pariwisata dan tenaga kerja pariwisata serta mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja sektor pariwisata;

6. Peningkatan kreatifitas dan kualitas bagi pelaku ekonomi kreatif, dan mitra usaha ekonomi kreatif;
7. Mendorong bertumbuhnya usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. Mendorong peningkatan investasi dan kemitraan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
9. Peningkatan kemitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, baik antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif di sektor swasta;
10. Koordinasi dan sinkronisasi data-data kepariwisataan dan ekonomi kreatif lintas sektoral maupun antar Kabupaten/Kota;

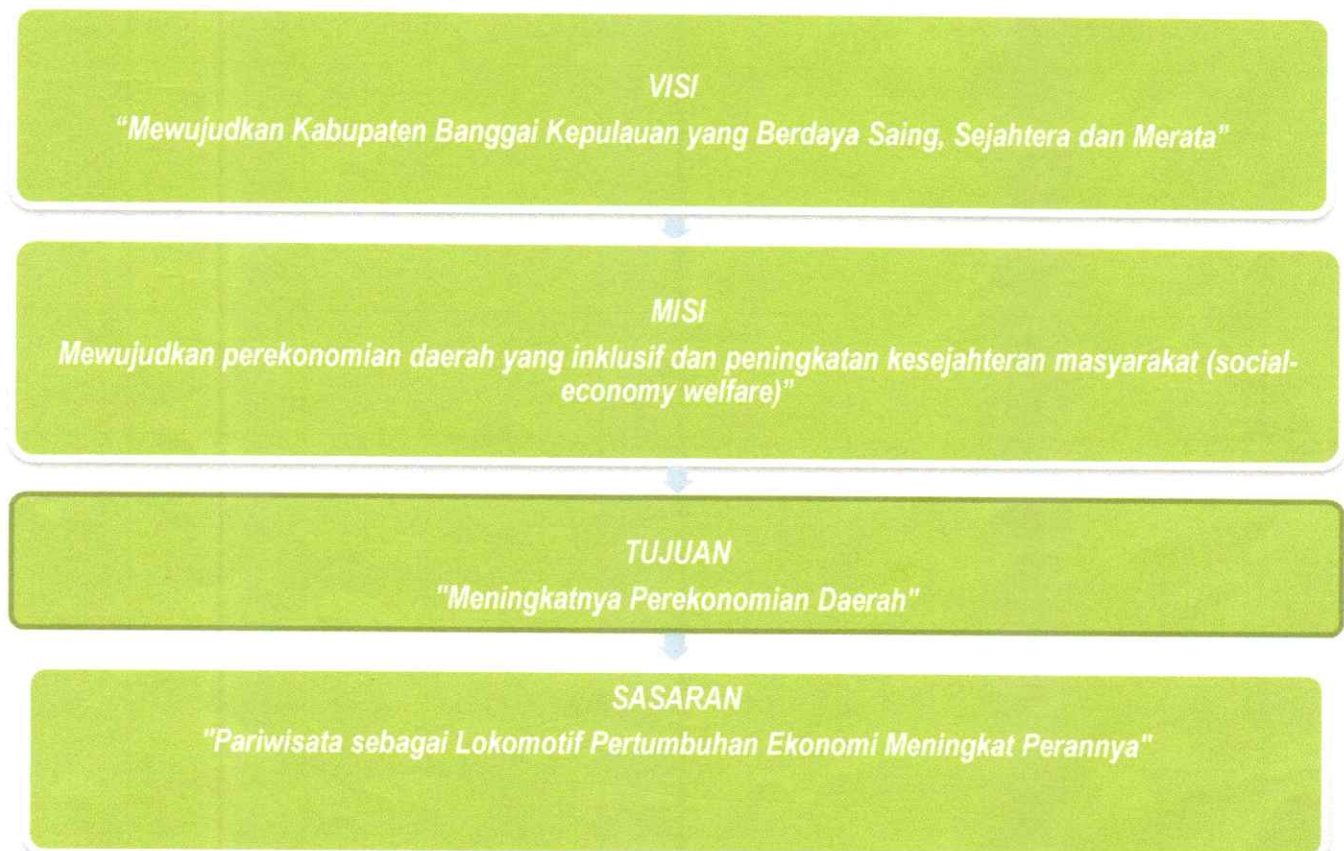
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari Visi dan Misi daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten, dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Pariwisata. Tujuan dan sasaran Renstra ini merupakan dampak keberhasilan dari program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata. Sementara Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata mendukung Tujuan dan Sasaran RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan.

4.1.1 Tujuan

Tujuan Dinas Pariwisata adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan, untuk menangani isu strategis Dinas Pariwisata yang dihadapi serta menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan. Rumusan tujuan ini merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pariwisata. Tujuan tersebut adalah : Misi **"Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Social-economy welfare)"**



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2023	2024	2025
1	Meningkatnya Perekonomian Daerah	1.1 Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	1.1.1 Tersedianya Kelengkapan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung pariwisata	25%	25%	25%
			1.1.2 Terpenuhi SDM pemasaran Pariwisata	20%	20%	30%
			1.1.3 Bertambahnya minat masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif	20%	20%	30%
			1.1.4 Bertambahnya pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan event dan atraksi	20%	20%	30%
			1.1.5 Adanya Investasi di bidang pariwisata	20%	20%	30%
			1.1.6 Terpenuhi Standarisasi Usaha pariwisata sesuai Peraturan yang berlaku	25%	25%	25%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata	2.2.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	25%	25%	25%	25%
			2.2.2 Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%
			2.2.3 Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%
			2.2.4. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	25%	25%	25%
			2.2.5 Terpenuhi surat Kendaraan Dnas	25%	25%	25%	25%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA

5.1 Strategi

Strategi dan Arah Kebijakan dalam renstra Dinas Pariwisata adalah strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata menunjukkan bagaimana cara Dinas Pariwisata mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan target kinerja hasil (outcome) program yang terdapat dalam RPJPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pariwisata bagi setiap program prioritas.

Strategi pengembangan potensi wisata yang dapat menunjang peningkatan ekonomi rakyat, mengembangkan usaha skala kecil melalui ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi lokal dan kekhasan budaya daerah setempat.

Dalam pelaksanaan RPJPD tahun 2023-2026, untuk menjalankan misi 4 tersebut, digunakan strategi sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung pariwisata	Telaksananya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung pariwisata
		Meningkatnya Pengembangan Atraksi Wisata	Telaksananya pemasaran dan promosi obyek wisata
		Meningkatnya Kualitas Amenitas	Telaksananya pengelolaan lingkungan terkait kepariwisataan
		Meningkatnya Promosi Wisata	Telaksananya pembangunan Industry pariwisata
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata	Meningkatnya Investasi	Mendorong Telaksananya Investasi pada bidang pariwisata
		Meningkatnya Standar Prosedur Manajemen Pariwisata	Telaksananya Standar Prosedur Manajemen Pariwisata
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat	Telaksananya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut, maka Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- ▶ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- ▶ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- ▶ Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
- ▶ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- ▶ Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- ▶ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- ▶ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- ▶ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- ▶ Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- ▶ Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- ▶ Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- ▶ Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Program Pemasaran Pariwisata mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- ▶ Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAKI

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Tabel 6.1

61 Gauri

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja OPD sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (**outcomes**/hasil atau dampak) dari kegiatan(**output**/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran, karena hasil (**outcomes**) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang. Penetapan indikator kinerja utama program pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Kunjungan wisatawan nusantara	115.260	118.260	121.023	127.074	133.428	140.100	140.100
2	Kunjungan wisatawan mancanegara	0	10	15	20	25	30	30
3	Lama kunjungan wisata	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
4	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp)	0	1.000.000.000	1.250.000.000	1.450.000.000	1.600.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5	Jumlah Pelaku usaha kreatif bidang pariwisata	624	636	648	660	672	684	684

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 merupakan rencana yang masih bersifat strategis dan indikatif, sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu empat tahun. Penjabaran ini merupakan Rencana Kerja Tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPJPD dan Renstra.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata 2023-2026 akan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pariwisata, sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD dengan pagu indikatif yang ditetapkan. Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata akan dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Tim dari Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata ini akan lebih ditentukan melalui keterlibatan Stakeholder pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan yang direncanakan merupakan program kegiatan yang melibatkan semua pihak.

KEPALA DINAS PERIWISATA



EDISON E. MOLIGAY, S. Sos., M.A.P
Nip. 196907061991031006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA KAB BANGGAI KEPULAUAN**

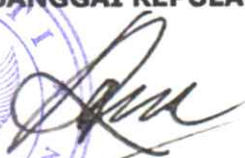
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. RAIS D.ADM**
Jabatan : **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. RAIS D. ADAM

Pihak Pertama,
**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Jumlah Daya Tarik Wisata	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Di Kembangkan Menjadi Destinasi Pariwisata	3 (Tiga) DTW
2	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pariwisata.	Jumlah pelaku usaha yang di bina	40 orang
3	Meningkatkan pengembangan kawasan strategis pariwisata.	Jumlah kawasan strategis yang dikembangkan	3 KSP
4	Meningkatkan peran serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Jumlah pelaku usaha pariwisata ekonomi kreatif yang dilatih	20 pelaku ekonomi kreatif
5	Fasilitasi HAKI kegiatan ekonomi kreatif.	Jumlah legalisasi produk ekonomi kreatif.	2 produk
6	Memfasilitasi akses permodalan dan pemasaran untuk pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	10 usaha
7	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kab. Banggai Kepulauan	Jumlah Dokumen Kunjungan Wisatawan	1 Dokumen
8	Tersedianya Layanan dan Fasilitas Pendukung/Media Promosi Pariwisata yang memadai	Jumlah Sarana/Media Promosi dan Informasi Pariwisata	1 Media
9	Meningkatkan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah daya tarik wisata yang di promosikan	7 daya tarik wisata
10	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri	11.110 Orang

No	Program	Anggaran
1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata	198.183,000
2	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata	37.410,000
3	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan destinasi pariwisata kabupaten/kota	128.350,000
4	Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	283.045.675
5	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis kabupaten/kota	200.000.000
6	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	50.008.849

7	Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar	77.883.225
8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	74.407.100
9	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	50.346.525
10	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisataakabupaten/kota	123.595.571
11	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	49.911.100

Salakan, 22 April 2021

 **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

H. RAIS D. ADAM

**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


MOHAMAD WAHYUDI. ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI
KEPULAUAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP**
Jabatan : **Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PARIWISATA DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Aparatur	100%
3	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya pelaporan keuangan yang akurat	100%

	Nama Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.007.865.045

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama,
**SEKRETARIS DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITTI SARAH, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA KAB BANGGAI KEPULAUAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG DESTINASI DAN
INDUSTRI PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

SITTI SARAH, SE
NIP.19801129 200212 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Jumlah Daya Tarik Wisata	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Di Kembangkan Menjadi Destinasi Pariwisata	3 (Tiga) DTW
2	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pariwisata.	Jumlah pelaku usaha yang di bina	40 orang
3	Meningkatkan pengembangan kawasan strategis pariwisata.	Jumlah kawasan strategis yang dikembangkan	3 KSP

	Program		Anggaran
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp	5.945.490,00

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
PL. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN



MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG DESTINASI DAN
INDUSTRI PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN



SITTI SARAH, SE
NIP. 19801129 200212 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZAINUDIN MALINGONG, SE**
Jabatan : **Plt. KASI. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA KAB BANGGAI KEPULAUAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama
**Plt. KASI. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

ZAINUDIN MALINGONG, SE
NIP.19751205 200804 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Fasilitasi HAKI kegiatan ekonomi kreatif.	Jumlah legalisasi produk ekonomi kreatif.	2 produk

	Program		Anggaran
1	Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau siswa	Rp	77.883.225

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama
**Pt. KASI. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



ZAINUDIN MALINGONG, SE
NIP.197551205 200804 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAMJA BAKALINGA, SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA KAB BANGGAI KEPULAUAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

HAMJA BAKALINGA, SH
NIP. 19790307 200701 1 019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri	11.110 Orang

- | | Nama Program | Anggaran |
|----|--|-------------|
| 1. | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 164.777.625 |

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



HAMJA BAKALINGA, SH
NIP. 19790307 200701 1 019



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JAMALUDDIN, SH**
Jabatan : **KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP**
Jabatan : **Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama
**KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

JAMALUDIN, SH
NIP. 19630929 198412 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersediahnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi yang di rencanakan	

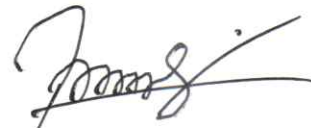
Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama
**KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



JAMALUDIN, SH
NIP. 19630929 198412 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAYATI TIAH, S.Hut.,M.M**
Jabatan : **KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP**
Jabatan : **Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN

MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama
KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KAB. BANGGAI KEPULAUAN

HAYATI TIAH, S.Hut.,M.M
NIP. 19800720 200801 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Bappeda, antara lain : RENSTRA, RENJA, IKU, TAPKIN, LAKIP, TEPPA	6 Dokumen
2	Terciptanya Tata Kelola Keuangan dan Pelaporan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Jumlah SPP yang Masuk dan Dapat diproses Pembayaranannya	149 SPP
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang tersusun	12 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan Persemester sesuai Aplikasi	2 Laporan
3	Tersusunnya Dokumen Anggaran berdasarkan Hasil Asistensi	Jumlah Dokumen Anggaran yang tersusun berdasarkan hasil Asistensi : RKA Penetapan, DPA Penetapan, RKA Perubahan, DPA Perubahan	4 Dokumen
4	Terciptanya Pengelolaan Aset dan Pelaporan Inventaris Aset yang Efektif dan Efisien	Jumlah Pemeliharaan Aset yang dilakukan Tepat Waktu	24 Unit
		Jumlah Laporan Inventaris Aset yang tersusun setiap Bulan : Kartu Persediaan Barang, Kartu Inventaris Barang (KIB) A, Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah (Barang Pakai Habis), Berita Acara Persediaan Barang (Stock Opname)	4 Laporan

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama
**KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



HAYATI TIAH, S.Hut., M.M
NIP. 19800720 200801 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERPINA ALIA, SH**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SITTI SARAH, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG DESTINASI DAN
INDUSTRI PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

SITTI SARAH, SE
NIP.19801129 200212 2 003

Pihak Pertama
**KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAYA
TARIK WISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

ERPINA ALIA, SH
NIP. 19811019 200502 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Jumlah Daya Tarik Wisata	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Di Kembangkan Menjadi Destinasi Pariwisata	3 (Tiga) DTW

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Rp 198.183,000
2	Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 37.410,000

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG DESTINASI DAN
INDUSTRI PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


SITTI SARAH, SE
NIP. 19801129 200212 2 003

Pihak Pertama
**KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAYA
TARIK WISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


ERPINA ALIA, SH
NIP. 19811019 200502 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOH. AFDHAL A. MAISA, S.Pd**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HAMJA BAKALINGA, S.H**
Jabatan : **KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, April 2021

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG DESTINASI DAN
INDUSTRI PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

HAMJA BAKALING, S.H
NIP. 19790307 200701 1 019

Pihak Pertama
**KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
KAWASAN PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

MOH. AFDHAL A. MAISA, S.Pd
NIP. 19800517 201001 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan pengembangan kawasan strategis pariwisata.	Jumlah kawasan strategis yang dikembangkan	3 KSP

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | | | |
|---|---|----|-------------|
| 1 | Pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota | Rp | 283.045.675 |
| 2 | Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota | Rp | 200.000.000 |

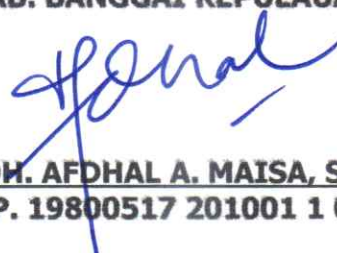
Salakan, April 2021

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG DESTINASI DAN
INDUSTRI PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



HAMJA BAKALINGA, S.H
NIP. 19790307 200701 1 019

Pihak Pertama
**KASI. PENGEMBANGAN KAWASAN
PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



MOH. AFDHAL A. MAISA, S.Pd
NIP. 19800517 201001 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITTI HAJAR D, SE**
Jabatan : **KASI. PENGEMBANGAN INDUSTRI**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SITTI SARAH, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI
KAB. BANGGAI KEPULAUAN


SITTI SARAH, SE
NIP.19801129 200212 2 003

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI
KAB. BANGGAI KEPULAUAN


SITTI HAJAR D, SE
NIP. 19740601 200604 2 025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pariwisata.	Jumlah pelaku usaha yang di bina	40 orang

KEGIATAN

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota

ANGGARAN

Rp 128.350.000

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
DESTINASI DAN INDUSTRI
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



SITTI SARAH, SE
NIP.19801129 2002 2 003

Pihak Pertama
**KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN INDUSTRI
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



SITTI HAJAR D, SE
NIP. 19740601 200604 2 025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMAT DARTIAN, S.Par., M.Sc**
Jabatan : **KASI PROMOSI WISATA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HAMJA BAKALINGA, SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN

HAMJA BAKALINGA, SH
NIP.19790307 200701 1 019

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PROMOSI WISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN

RAHMAT DARTIAN, S.Par., M.Sc
NIP. 19790731 201101 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Layanan dan Fasilitas Pendukung/Media Promosi Pariwisata yang memadai	Jumlah Sarana/Media Promosi dan Informasi Pariwisata	1 Media

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Rp 123.595.571

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMASARAN PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN



HAMJA BAKALINGA, SH
NIP.19790307 200701 1 019

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI
PROMOSI WISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN



RAHMAT DARTIAN, S.Par., M.Sc
NIP. 19790731 201101 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIANAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD MUHTAR, S.Sos**
Jabatan : **KASI RISET DAN ANALISIS DATA PARIWISATA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HAMJA BAKALINGA, SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMASARAN PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN

HAMJA BAKALINGA, SH
NIP.19790307 200701 1 019

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI
RISET DAN ANALISIS DATA PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN

MUHAMAD MUHTAR, S.Sos
NIP.19850417 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kab. Banggai Kepulauan	Jumlah Dokumen Kunjungan Wisatawan	1 Dokumen

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 50.346.525

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMASARAN PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN



HAMJA BAKALINGA, SH
NIP.19790307 200701 1 019

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI
RISET DAN ANALISIS DATA PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN



MUHAMAD MUHTAR, S.Sos
NIP. 19850417 201101 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOH. YAMIN TALIB, S.Pd**
Jabatan : **KASI. STRATEGI PEMASARAN DAN BREN PARIWISATA**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HAMJA BAKALINGA, SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
PEMASARAN PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

HAMJA BAKALINGA, SH
NIP.19790307 200701 1 019

Pihak Pertama
**KEPALA SEKSI
STRATEGI PEMASARAN DAN BREN PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

MOH. YAMIN TALIB, S.Pd
NIP. 19840513 201101 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah daya tarik wisata yang di promosikan	7 daya tarik wisata

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | | | |
|---|---|----|------------|
| 1 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Rp | 49.911.100 |
|---|---|----|------------|

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
PEMASARAN PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN



HAMJA BAKALINGA, SH
NIP.19790307 200701 1 019

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI
STRATEGI PEMASARAN DAN BREN PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN



MOQ.YAMIN TALIB, S.Pd
NIP. 19840513 201101 1 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZAINUDIN MALINGONG, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

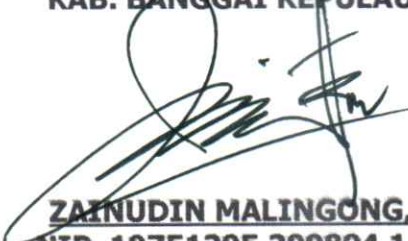
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


ZAINUDIN MALINGONG, SE
NIP. 19751205 200804 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Fasilitasi HAKI kegiatan ekonomi kreatif.	Jumlah legalisasi produk ekonomi kreatif.	2 produk

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pelatihan dasar SDM kepariwisataan kepada masyarakat guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)	Rp 77.883.225

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



MOHAMAD WAHYUDI, ST., MP
NIP. 19770205 200312 1 005

Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG EKONOMI KRAETIF
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**



ZAINUDIN MALINGONG, SE
NIP. 19751205 200804 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TRI DARMA WIHARJO, SE**
Jabatan : **KASI. RISET EDUKASI PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ZAINUDIN MALINGONG, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
EKONOMI KREATIF
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


ZAINUDIN MALINGONG, SE
NIP.19751205 200804 1 001

Pihak Pertama
**KASI. RISET EDUKASI PENGEMBANGAN
SDM DAN INFRASTRUKTUR
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


TRI DARMA WIHARJO, SE
NIP. 19821229 201001 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan peran serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Jumlah pelaku usaha pariwisata ekonomi kreatif yang dilatih	20 pelaku ekonomi kreatif

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Rp 50.008.849

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
EKONOMI KREATIF
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


ZAINUDIN MALINGONG, SE
NIP.19751205 200804 1 001

Pihak Pertama
**KASI.RISET EDUKASI PENGEMBANGAN
SDM DAN INFRASTRUKTUR
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


TRI DARMA WIHARJO, SE
NIP. 19821229 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUDIN NEEKE, SH**
Jabatan : **KASI. PERMODALAN DAN PEMASARAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

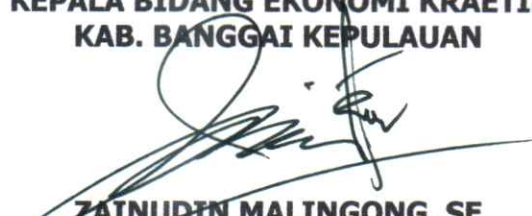
Nama : **ZAINUDIN MALINGONG, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG EKONOMI KRAETIF
KAB. BANGGAI KEPULAUAN


ZAINUDIN MALINGONG, SE
NIP.19751205 200804 1 001

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI PERMODALAN DAN
PEMASARAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN


RUDIN NEEKE, SH
NIP. 19781208 200604 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Memfasilitasi akses permodalan dan pemasaran untuk pelaku ekonomi kreatif	-Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	10 usaha

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Rp 74.407.100

Salakan, 22 April 2021

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
EKONOMI KREATIF
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


ZAINUDIN MALINGONG, SH
NIP.19751205 200804 1 001

Pihak Pertama
**KEPALA SEKSI
PERMODALAN DAN PEMASARAN
KAB. BANGGAI KEPULAUAN**


RUDIN NEEKE, SH
NIP. 19820504 201001 1 012

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PARIWISATA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	Aksi/ Kegiatan	Jadwal				Output
							I	II	III	IV	
1	Meningkatkan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi	Kelengkapan sarana dan prasarana Infrastruktur pendukung pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.828.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	✓	✓			Jumlah Peserta Koordinasi dan sinkronisasi yang direncanakan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.050.757.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	✓	✓	✓	✓	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	✓	✓	✓	✓	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓	✓	✓	✓	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar palaknya
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	✓	✓	✓	✓	Jumlah ATK yang direncanakan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.716.555	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	✓	✓	✓	✓	Jumlah Barang Cetakan yang direncanakan
						Penyediaan Bahan Bacaan Cetakan dan Penggandaan	✓	✓	✓	✓	Jumlah Bahan Cetakan Penggandaan yang direncanakan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	✓	✓	✓	✓	Jumlah Peserta Koordinasi dan sinkronisasi yang direncanakan
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	✓	✓	✓	✓	Jumlah Materai yang direncanakan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546.172.540	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	✓	✓	✓	✓	Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik yang direncanakan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Jasa / Kegiatan yang dibayarkan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	✓	✓	✓	✓	Jumlah Jasa pemeliharaan kendaraan operasional yang direncanakan

2	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan pemandu wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.390.250	Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	☐ ☒ ☒	☐ ☒ ☐	Jumlah Meubeleur Kantor Jumlah peralatan mesin lainnya Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang direncanakan
3	Memberdayakan Kawasan Desa Wisata yang terintegrasi		Program Pemasaran Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata/Kota	852.934.615	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kab.Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab.Kota	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	Jumlah sarana prasarana kegiatan yang dibangun Jumlah Dokumen Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota Jumlah sarana dan Prasarana wisata yang diadakan Jumlah Kegiatan yang direncanakan Jumlah Kegiatan yang direncanakan
4	Mewujudkan sumber daya manusia yang profesionalisme		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	223.853.196	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kab/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒	Jumlah Kegiatan yang direncanakan Jumlah Kegiatan yang direncanakan Jumlah Kegiatan yang direncanakan Jumlah Kegiatan yang direncanakan Jumlah Kegiatan yang direncanakan